

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DESA JETIS KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	<p>Nominal Rupiah yang tertera dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) - Surat Permintaan Penawaran - Penawaran Penyedia - Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa - Berita Acara Evaluasi, Verifikasi dan Negosiasi Penawaran Penyedia. - Surat Penetapan Penyedia - Bukti/ DO / Direct Order Material / Bahan /PO - Surat Permintaan pembayaran (SPP) - Surat Perintah Membayar (SPM) - Kwitansi pembayaran - Nota pembayaran - Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai - Buku Pembantu Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> - UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan huruf j - Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi kerahasiaan nominal Rupiah

2	Nominal Rupiah yang tertera dalam Perjanjian Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"> - UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan huruf j - Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya 	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi kerahasiaan nominal Rupiah
3	Biodata Kepala Desa dan Perangkat Desa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi Kepala Desa Dan Perangkat Desa yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang bersifat rahasia
4	Dokumen/Database/Arsip Kepala Desa Dan Perangkat Desa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi Kepala Desa Dan Perangkat Desa yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang bersifat rahasia
5	Identitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang bersifat rahasia
6	Identitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang bersifat rahasia
7	Data usulan pengangkatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa dalam jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja

8	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 44 - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i 	Tidak terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.
9	Dokumen Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	<ul style="list-style-type: none"> - UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan huruf j - Keppres NO. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya 	Selama Proses pengadaan Barang / Jasa	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (Informasi apabila buka menimbulkan penilaian tidak obyektif)	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
10	Dokumen Penawaran Kontrak	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 Etika Pengadaan.	Selama Proses pengadaan Barang / Jasa	Muncul Persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian
11	Kode Akses Elektronik dan User akses/password	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 1 angka 16)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
12	Sistem Keamanan Elektronik	UU 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf J UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
13	Sistem Managemen Database	UU 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf J UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Database

14	<p>Hasil Pemeriksaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Reguler, - Pemeriksaan Kasus, - Pemeriksaan Khusus, - Review Laporan Keuangan, - Evaluasi/Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 pasal 6 huruf c ayat 6 dan pasal 17 huruf i - Peraturan MENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah, bab/no.4500 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No.28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a. 	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. - Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP. - Melanggar Peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LHP. 	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
15	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Keuangan Desa yang belum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> - UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan huruf j - Keppres NO. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya 	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi kerahasiaan dokumen
16	Kontrak Kerja Pengadaan Barang/Jasa.	Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
17	Berkas perkara PTUN dan perkara Perdata sebelum disampaikan di persidangan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a dan Huruf i	Sampai dengan keputusan inkrahct / mempunyai kekuatan hukum tetap.	Dapat menghambat proses penegakan hukum.	Memperlancar proses penegakan hukum.
18	Laporan Hasil Pengawasan, terdiri dari : a. Laporan Hasil Pemeriksaan, b. Laporan Hasil Reviu; dan c. Laporan Hasil Evaluasi dan	a) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; b) PP No. 60 Th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan

	Monitoring	<p>Pemerintah;</p> <p>c) PP Nomor 12 Th 2017 ttg Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 Ayat (2);</p> <p>d) Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode etik Pengawasan Intern Pemerintah;</p> <p>e) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia : STANDAR KOMUNIKASI AUDIT INTERN No. 4060 - Pendistribusian Hasil Audit Intern;</p>		pengungkapan secara prematur	pelaksanaan kebijakan
19	Data hasil check up perorangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa / pejabat lainnya.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi Kepala Desa Dan Perangkat Desa yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang bersifat rahasia
20	Data hasil Evaluasi Kinerja Kepala Desa Dan Perangkat Desa / pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi Kepala Desa Dan Perangkat Desa yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang bersifat rahasia
21	Identitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah.	Melindungi data pribadi Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang bersifat rahasia.
22	Data rencana mutasi perangkat desa dan perangkat lainnya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah kolusi
23	Soal tes Perangkat Desa dan perangkat lainnya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN
24	Penderita HIV / AIDS	<ul style="list-style-type: none"> - Kesepakatan WHO - Permenko Kesra II/2009 	Tidak terbatas	- Bertentangan dg kesepakatan	Melindungi HAM dan menghindari dari

		<ul style="list-style-type: none"> - Perda no 5 / 2009 - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 		<ul style="list-style-type: none"> internasional - Mengungkap data pribadi yg bersifat rahasia 	stigma dan diskriminasi
25	Data Keuangan IKM (Industri Kecil Menengah) dan UDKM (Usaha Dagang Kecil Menengah)	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 3	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan
26	Perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 Ps 17 huruf a, - UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum
27	Dokumen proses penyelesaian sengketa/ konflik lingkungan	UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa).	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum
28	Rencana Detail Hasil AMDAL bidang pertahanan keamanan	UU No 14 tahun 2008 Ps 17 huruf c	Tidak terbatas	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara/ daerah	Melindungi ketahanan dan keamanan negara
29	Hasil Uji Mutu Pangan di Produsen	<ul style="list-style-type: none"> - UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b, - UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, - UU Pangan No. 71 Tahun 1996 - UU No. 69 Tahun 1999 tentang Iklan dan Pelabelan 	Sampai dengan ada keputusan resmi	Menimbulkan Keresahan di Masyarakat	Melindungi ketentraman masyarakat
30	Hasil Monitoring adanya dugaan penyimpangan program bantuan kepada pemerintah desa/kel dan kelompok masyarakat	UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat 2	Sampai adanya petunjuk/rekomen dari Gubernur	Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Asas Praduga tak Bersalah)	Melindungi hak privasi

31	Data pribadi penduduk / data perseorangan dan dokumen kependudukan	UU 24 Tahun 2013 Pasal 79 angka 1, Pasal 84 angka 1 dan 2	Tidak terbatas	Menimbulkan permasalahan hukum karena data-data tersebut wajib disimpan dan dilindungi keabsahannya oleh negara	Data pribadi seseorang terlindungi, terjaga keabsahannya dan hanya boleh diakses oleh lembaga-lembaga pengguna dengan izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan ruang lingkup data yang diperlukan.
32	Data Kelayan UPT (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (Mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitasi/ penanganan kelayan)	Melindungi hak pribadi kelayan
33	Identitas Korban Tindak Kekerasan	UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (Menimbulkan gangguan traumatis kelayan terutama bagi korban tindak kekerasan seksual dan pembunuhan)	Membantu mempercepat proses rehabilitasi sosial kelayan
34	Identitas Pasien yang Direhabilitasi terkait Penyalahgunaan Narkoba	UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Membantu mempercepat proses rehabilitasi
35	Arsip daftar orang yang masuk G 30 S PKI dan organisasi terlarang lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan huruf j - UU nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 - TAP MPRS No. 22 Th 1966 	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

36	Data Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none">- UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan huruf j- UU nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

KEPALA DESA JETIS

NUR WIBOWO, ST.